GWR/Juli/2017

BUNGA RAMPAI PENDIDIKAN DAN DUNIA AKADEMIK DI INDONESIA

Sebuah Renungan

Oleh:
Gunawan Wiradi

PENGANTAR

Ada sejumlah pertanyaan yang sudah terlalu sering disampaikan kepada saya oleh berbagai pihak, terutama oleh para mahasiswa, para aktivis LSM, dan lain-lain, khususnya para generasi muda. Pertanyaan-pertanyaan tersebut antara lain adalah:

1. Apa sajakah yang menjadi perbedaan pokok antara sistem pendidikan di jaman Belanda dulu, dengan yang ada sekarang?
2. Apa sebenarnya makna dari gelar-gelar S-1, S-2, dan S-3?
3. Mengapa ada gelar "Prof Riset"? Apa arti gelar Profesor? Apa ada orang yang sebelumnya belum pernah melakukan riset tapi memperoleh gelar Profesor?
4. (dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan lain).

Terus terang, tidak mudah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Apalagi, secara formal, saya merasa tidak mempunyai wewenang untuk menjawabnya. Namun sejumlah teman tetap mendorong agar saya menuangkan pandangan saya secara tertulis, apapun isinya. Karena itu tulisan ini hanyalah sebuah "renungan", yang semata-mata didasarkan atas "kesaksian" ataupun pengalaman terbatas, dan tidak langsung menjawab hal-hal di atas.

Secara umum dan sepintas, renungan ini tertuang dalam empat bagian pokok, yaitu:

Bagian I: Kebijakan kolonial di bidang pendidikan
Bagian II: Serba-serbi pendidikan sebelum Indonesia merdeka
Bagian III: Beberapa tonggak sejarah sesudah Indonesia merdeka
Bagian IV: Perkembangan khusus di Bogor
Bagian V: Penutup

Sebagai sebuah renungan, penuangannnya merupakan hasil pikiran yang melayang-layang kesana kemari, dalam rangka mencermati hal-hal yang secara historis saya anggap relevan. Karena itu alur ceritanya mungkin akan terasa kurang sistematis dan bersimpang-siur. Semua itu karena saya merasa canggung dalam usaha menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas. Walaupun demikian, mudah-mudahan tulisan ini ada gunanya, untuk bisa menjawab sendiri pertanyaan-pertanyaan itu.

I. KEBIJAKAN KOLONIAL DI BIDANG PENDIDIKAN

Istilah “kolonial” itu berasal dari istilah “colon” dalam bahasa Latin, juga bahasa Yunani Kuno, yang artinya petani, atau pemukiman di suatu wilayah untuk bertani (K. Prent, *et. al.*, 1969).

Di jaman penjajahan Belanda di Indonesia dulu, pernah ada kebijakan yang disebut dengan istilah program “kolonisasi”, yaitu pemindahan penduduk pedesaan Jawa ke Lampung dan membuka tanah untuk pertanian. Kemudian istilah tersebut diganti dengan istilah “transmigrasi”. Jadi, “koloni” adalah wilayah baru bagi suatu negara untuk kepentingan memperoleh sumber daya alam bagi rakyat dari negara “penjajah” tersebut. Begitulah, kurang lebih, asal mulanya. Tetapi dalam sejarah perkembangannya, tujuan “penjajahan” menjadi berbeda-beda jika dibandingkan diantara berbagai negara penjajah, sehingga implikasinya terutama dibidang pendidikan juga berbeda.

1. Spanyol

Kolonialisme Spanyol menunjukkan ciri-ciri yang mencerminkan makna asli dari istilah “koloni”. Tanah jajahan Spanyol di Amerika Latin, misalnya, diangggap sebagai wilayah baru milik Spanyol. Karena itu budaya asli masyarakat setempat dibabat habis. Bentuk bangunan, rumah, cara makan, cara berpakaian, cara bernyanyi, dan bahasanya, semuanya di”spanyolkan”kan. Tetapi di sisi lain, karena dianggap sebagai wilayah baru bagi orang Spanyol yang menetap di sana, maka di wilayah itu perlu didirikan sarana pendidikan bagi orang-orang Spanyol yang menetap tersebut. Begitulah misalnya, di Argentina jauh sebelum negeri itu merdeka, sudah didirikan sebuah Universitas di tahun 1822. Memang semula hanya untuk orang Spanyol, tapi lama kelamaan penduduk pribumi berkesempatan pula memperoleh pendidikan di situ. Karena itu, di berbagai negara di Amerika Latin, begitu merdeka jumlah sarjana lulusan universitas relatif sudah banyak. Ini amat berbeda dengan kondisi di Indonesia.

2. Inggris

Kolonialisme Inggris mempunyai ciri berbeda. Tujuan Inggris menguasai wilayah-wilayah luas adalah untuk memasarkan berbagai produk industrinya. Untuk itu maka dalam masyarakat tanah jajahan itu perlu diusahakan terciptanya kelas menengah, yaitu kelas ekonomi yang mampu membeli produk-produk insustri itu. Karena itu, di negara-negara bekas jajahan Inggris, seperti India, Pakistan, Malaysia, dll., jauh sebelum merdeka di situ sudah ada kampus-kampus besar universitas. Pendidikan dianggap sebagai salah satu sarana bagi terbentuknya kelas menengah. Tidak seperti Spanyol, Inggris tidak terlalu jauh mencampuri budaya setempat.

3. Belanda

Berbeda dari Spanyol dan Inggris, kolonialisme Belanda, terutama di Indonesia, mempunyai ciri tersendiri. Negeri Belanda adalah negara kecil, penduduknya sedikit, sebagian wilayahnya berada di bawah permukaan laut, dan tidak punya komiditi ekspor. Secara bergurau ada yang menyatakan bahwa yang diekspor Belanda adalah tenaga intelektual. Banyak profesor Belanda yang bekerja di negara lain. Jadi, tujuan mencari tanah jajahan adalah untuk memperoleh wilayah yang sumber daya alamnya dapat diekploitasi untuk diekspor, dengan menggunakan tenaga

rakyat setempat. Investasi dalam bentuk perusahaan perkebunan besar memerlukan sejumlah besar tenaga kerja sebagai buruh murah. Karena tujuan pokoknya adalah menguras sumber daya alam, maka pendidikan hanya cukup diberikan sampai pada taraf dapat membantu kegiatan eksploitasi itu.

Demikian secara sekilas latar belakangnya.

II. INDONESIA SEBELUM MERDEKA

Perhatian pemerintah kolonial Belanda terhadap soal pendidikan baru dimulai pada peralihan abad-19 ke abad-20, yaitu lahirnya apa yang dikenal sebagai "*Ethische Politiek*" (Politik Etis). Kebijakan ini mencakup 6 (enam) program, yaitu: irigasi, reboisasi, kolonisasi (atau transmigrasi), pendidikan, kesehatan, dan perkreditan. Jadi, berbeda dari negara-negara jajahan Inggris maupun Spanyol, sebelum Perang Dunia-II, di Indonesia belum ada universitas.

Sebelum PD-II, sebelum kedatangan Jepang, gambaran dunia pendidikan sepanjang saya tahu, adalah sebagai berikut.

Terutama di daerah Karasidenan Surakarta (Solo), Sekolah Dasar, atau Sekolah Rendah itu ada lima atau enam kategori:

1. Di desa ada Sekolah Desa, 3 tahun
2. Di kota, ada Sekolah Rendah Angka-2 lamanya 6 tahun, tapi tanpa pelajaran Bahasa Belanda
3. Ada Sekolah Rendah Angka-1 lamanya 6 tahun. Menerima pelajaran Bahasa Belanda. Tetapi kalau lulus, belum bisa meneruskan ke tingkat SMP (dulu namanya MULO= *Meer Uitgebreid Lagere Onderwijs*, yang artinya Sekolah Rendah yang lebih diperluas). Jika dari SR angka-1 ini ingin melanjutkan ke MULO, harus melalui sekolah penghubung (*schakel school*)
4. Ada HIS (*Hollandsch-Inlandsche School*). Lamanya 7 tahun, atau bahkan 8 tahun, jika seorang anak masuknya mulai kelas-0 (nol), karena umurnya belum 6 tahun. Ada pelajaran Bahasa Belanda, dan bahkan sejak kelas-4, Bahasa Belanda menjadi pengantar. Di luar kelas, pergaulan antara murid-murid diwajibkan berbahasa Belanda. Jika lulus ujian penghabisan HIS, orang bisa langsung masuk ke MULO, tanpa ujian masuk
5. Ada ELS (*Europese Lagere School* = Sekolah Rendah, khusus untuk orang-orang Eropa, atau pribumi yang statusnya disamakan dengan orang Eropa)

Itu semua adalah sekolah rendah negeri. Sekolah swasta, baik yang bersifat umum maupun yang berdasar agama juga ada.

Di tingkat menengah pertama, selain yang negeri (MULO), sekolah swasta juga ada. Di samping itu ada juga beberapa sekolah kejuruan, seperti misalnya HIK (*Holandsche Indische Kweekschool*) yaitu Sekolah Guru. Ada Sekolah Pertukangan, ada Sekolah Mantri Cacar. Ada "*Cultuur School*" (Sekolah Pertanian setingkat SMP).

Di tingkat SMA, dulu AMS (*Algemene Middelbare School* = Sekolah Menengah Umum). Sebelum kedatangan Jepang, di Indonesia, jumlah AMS it hanya 6 atau 7 buah, semuanya ada di Pulau Jawa, antara lain Solo, Yogya, dan Jakarta.

Di Surabaya ada HBS (*Hoogere Burger School*), yaitu sekolah yang lamanya 7 tahun, yang murid-muridnya diterima dari HIS ataupun ELS. Jadi, lulus sekolah dasar murid tersebut tak usah lewat MULO, langsung ke HBS (lulusan HBS bisa ke sekolah tinggi).

Ada juga sekolah untuk menjadi calon pegawai negeri, OSVIA (*Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren*). Sekolah ini kemudian ditingkatkan menjadi MOSVIA (*Middlebare* OSVIA).

Di bidang kesehatan ada STOVIA (*School tot Opleiding van Indische Artsen*). Jika tak salah, dulu dikenal sebagai Sekolah Dokter Jawa. Dikemudian hari lalu ada Sekolah Tinggi Kedokteran di Jakarta, yaitu GHS (*Geneeskundige Hoge School*).

Selain di bidang kedokteran, ada dua sekolah tinggi lagi, yaitu Sekolah Tinggi Teknik, THS (*Technische Hoge School*) di Bandung, dan *Rechts Hoge School* (RHS) Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta.

Sementara itu, di Bogor ada MLS (*Middlebare Landbouw School*) Sekolah Pertanian Menengah, yang kemudian menjadi SPMA (Sekolah Pertanian Menengah Atas), dan ada MBS (*Middlebare Boschbouw School*) yang kemudian menjadi SKMA, Sekolah Kehutanan Menengah Atas.

Demikianlah gambaran sepintas sebelum PD-II. Ketika kemudian pecah PD-II dan Belanda di Indonesia menyerah kepada Jepang, kondisi pendidikan mengalami beberapa perubahan. Antara lain:

a. Di tingkat Sekolah Dasar, lima kategori sekolah rendah tersebut di depan diratakan menjadi satu macam saja, yaitu menjadi Sekolah Rakyat atau SR (*Kokumin Gakko*)
b. Di tingkat SR itu, nilai rapor yang paling menentukan adalah nilai untuk "semangat"! Walaupun pelajaran nilainya bagus-bagus, jika "semangat"nya mendapat 4, murid yang bersangkutan tidak naik kelas.
c. Di tingkat SMP, laki dan perempuan dipisahkan sekolahnya. Jadi ada yang namanya SMPP (SMP Puteri)
d. Di tingkat SMA, di Magelang ada Sekolah Menengah Pamong Praja.

Demikianlah, selayang pandang kondisi pendidikan sebelum Indonesia merdeka.

III. BEBERAPA TONGGAK SEJARAH SESUDAH INDONESIA MERDEKA

a. 1945-1950

Periode ini dikenal sebagai periode "revolusi fisik". Baru beberapa bulan saja Ibukota RI pindah dari Jakarta ke Yogya, perang damai silih berganti. Tanggal 25 Maret 1947, ditandatangani "Perjanjian Linggarjati", yang isinya antara lain, Belanda mengakui "de facto" kekuasaan RI atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Walaupun demikian, kenyataannya hampir seluruh Pantai Utara Pulau Jawa diduduki tentara Belanda.

Pada masa damai itulah di Yogya didirikan Universitas Negeri Gajah Mada (UGM), sementara di Jakarta (yang diduduki Belanda), didirikan Universitas Indonesia (UI) oleh Belanda. UI ini mencakup Bogor

dan Bandung. Di Bogor ada dua fakultas, yaitu Fakultas Pertanian dan Fakultas Kedokteran Hewan. Hampir semua dosen-dosennya orang Belanda.

b. 1950-1957

Pada periode ini sebenarnya banyak berdiri lembaga-lembaga pendidikan di berbagai sektor, termasuk lembaga-lembaga yang tidak berada di bawah Kementerian Pendidikan tetapi merupakan lembaga pendidikan kedinasan. Misalnya ada Akademi Dinas Luar Negeri (ADLN), ada Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN, yang dikemudian hari menjadi Institut Ilmu Pemerintahan, setingkat sekolah tinggi), dan lain-lain. Tetapi renungan ini tidak akan mengulas perkembangan pendidikan di berbagai sektor tersebut, karena tujuannya adalah untuk mencoba menjawab berbagai pertanyaan tersebut di depan, yang didasarkan atas apa yang saya tahu, khususnya yang terjadi di Bogor, tempat saya kuliah dulu.

c. Di Bogor

Sampai dengan 1957, ada tiga hal yang secara ringkas dapat dicatat, yaitu:

1. Sebelum 1953, jumlah mahasiswa di kedua fakultas tersebut di atas tidak sampai seratus orang, 17 orang di Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) dan sekitar 60 orang di Fakultas Pertanian (FP). Karena masih merupakan negara "agraris" maka Indonesia memerlukan banyak sarjana pertanian. Bung Karno lalu berkampanye di mana-mana, agar para pemuda Indonesia memasuki Fakultas Pertanian. Maka barulah pada 1953 berduyun-duyunlah lulusan SMA masuk FP dan FKH (baik di Bogor maupun di UGM Yogya). Pada tahun itu di FP ada 361 orang mahasiswa baru (temasuk saya, GWR). Dari jumlah itu hanya 4 orang yang perempuan, dan barulah pada tahun 1955 mulai banyak mahasiswa perempuan.

2. Dosen
   Di Bogor saat itu, hampir semua dosennya orang-orang Belanda. Saat saya masuk FP (1953), Dekan FP adalah Prof Dr Kuilman. Orang-orang Indonesia, masih sebagai asisten, yaitu mereka yang sudah duduk di tingkat terakhir atau yang baru saja lulus sebagai insinyur (Ir). Pada tahun 1955, Pak Toyib Hadiwijaya (alm) meraih gelar *doctor*, dan beberapa bulan kemudian langsung menjadi dekan menggantikan Prof Dr Kuilman yang kembali ke negeri Belanda. Sekitar dua tahun kemudian, yaitu 1957, dua orang lagi insinyur Indonesia meraih gelar *doctor*, yaitu almarhum Pak Sajogyo (yang dulu bernama Kampto Utomo), dan almarhum Pak Bachtiar Rivai. Sementara itu dosen orang Indonesia yang sudah bergelar Profesor yang mengajar di FP Bogor baru ada tiga orang, dua diantaranya merupakan dosen pinjaman dari UI dan UGM, yaitu Prof Dr Iso (dari UGM) dan Prof DR Mr Sukanto (dari UI), serta Prof Ir Teko Sumodiwiryo.

3. Kurikulum
   Program belajar di FP Bogor saat itu adalah 5 ½ tahun, terdiri dari lima jenjang tingkatan, yaitu tingkat *propadeuse* (persiapan) dua tahun (P-1 dan P-2), tingkat *candidat* dua tahun (C-1 dan C-2)

dan tingkat "calon sarjana" 1 ½ tahun. Setiap tahun ada ujian untuk bisa naik tingkat, dan mendapat ijazah kenaikan tingkat. Dengan demikian, ada lima ijazah yaitu ijazah P-1, P-2, C-1, C-2, dan Insinyur. Karena sistemnya "studi bebas", mahasiswa tidak diharuskan untuk hadir setiap kuliah. Boleh hadir, boleh tidak, yang penting asal berani menempuh ujian pada akhir tahun pelajaran. Tidak ada ujian tertulis, semuanya ujian lisan. Orang boleh saja menyelesaikan studinya kapan saja, ada yang 6 tahun, 7 tahun bahkan dalam sejarah FP di Bogor, ada yang 15 tahun baru selesai menjadi insinyur. Tetapi uang kuliah hanya untuk 5 ½ tahun. Jadi, sistemnya tidak semesteran seperti sekarang, tidak ada ujian tengah semester, dll. Juga para dosen umumnya tidak memberikan petunjuk buku-buku bacaan apa yang wajib dibaca. Mahasiswa adalah "maha" pelajar, artinya pelajar yang sudah dewasa, karena itu harus mampu berdikari, mampu ambil keputusan sendiri, mampu melacak literatur di perpustakaan, buku apa yang memuat isi kuliah dosen itu.

IV. PERISTIWA KHUSUS: PENGALAMAN DI BOGOR

1. Tahun 1957, pemerintah Indonesia secara sepihak membatalkan perjanjian KMB. Dosen-dosen Belanda di Bogor berangsur-angsur pulang ke negeri Belanda. Staf pengajar di kedua fakultas di Bogor yang orang Indonesia, statusnya masih asisten dosen. Jadi timbul kekosongan, dan untuk sementara diisi dengan tenaga kontrakan dari luar negeri yang sifatnya jangka pendek (jika tak salah hanya satu tahun), sambil menunggu hasil perundingan untuk kerjasama dengan salah satu universitas di Amerika Serikat (AS).

2. Akhirnya datanglah secara bertahap dosen-dosen dari Universitas Kentucky. Saat itu Universitas Kentucky it di AS tidak termasuk "10 Besar", dan berada pada "ranking" ke-12, tetapi dipilih untuk kerjasama dengan FP Bogor karena saat itu Universitas Kentucky lah yang mempunyai kegiatan khusus di bidang "*rural sociology*". Semua dosen Kentucky yang ditugaskan ke Bogor ini sebelumnya belum pernah ke luar negeri. Rombongan mereka pertama ini, yang dikenal dengan "*Kentucky Contract Team*" (KCT), tentunya masih canggung dengan kondisi Indonesia. Karena itu, maka sebagai ketuanya lalu dipilih Prof Dr Howard Beers yang sebelumnya bekerja di Ford Foundation di Jakarta.

3. Kedatangan KCT itulah tonggak sejarah yang penting, karena dalam kerjasamanya dengan FP dan FKH, KCT merombak sistem kurikulum, dari sistem "studi bebas" menjadi sistem "studi terpimpin", dengan segala konsekuensinya. Kehadiran pada kuliah merupakan kewajiban (diabsen). Ujian tahunan diubah menjadi semesteran, dan lain-lain.

4. Pada awal masa peralihan tersebut ada dana bantuan yang disediakan untuk kepentingan studi di Amerika. Tetapi, demi kebutuhan yang mendesak, yaitu agar kekosongan dosen orang Indonesia segera terisi, maka baik dekan FP maupun dekan FKH mengambil kebijakan agar dana tersebut diberikan kepada sebanyak mungkin sarjana Indonesia yang statusnya masih asisten, yang berarti jatah dana per orang hanya kecil, hanya cukup untuk satu tahun. Dan memang tujuannya agar dalam

tempo satu tahun mereka yang belajar di Amerika itu sudah kembali. Jadi, di Amerika mereka diminta untuk mengikuti kuliah-kuliah tertentu saja yaitu bidang-bidang ilmu yang nanti setelah pulang menjadi bidang yang mereka ajarkan. Jelasnya, misalkan asisten ilmu fisika diminta memperdalam ilmu fisika sehingga setelah pulang menjadi dosen ilmu fisika. Jadi karena dana hanya untuk satu tahun, tidak cukup untuk mengambil gelar.

5. Seingat saya dalam satu tahun ada beberapa kali rombongan staf pengajar yang dikirim ke Amerika. Setiap rombongan, jumlah pesertanya tertentu tergantung dari beberapa yang lulus ujian Bahasa Inggris. Ada yang jumlahnya sampai 30 orang. Yang penting dicatat di sini adalah bahwa walaupun perintahnya "jangan mengambil gelar", tetapi dalam setiap rombongan selalu ada yang "nakal". Yaitu entah bagaimana caranya, mereka dalam satu tahun itu berhasil mengambil gelar "master". Dengan demikian, setiap rombongan yang pulang, selalu ada satu atau dua orang yang bergelar "master".

6. Setelah beberapa waktu kemudian, KCT mempunyai dana yang lebih besar dan memberi kesempatan kepada mereka yang ingin mengambil gelar PhD di Amerika. Banyak sekali yang melamar, namun sebagian besar ditolak, termasuk mereka yang sudah pernah satu tahun di Amerika tersebut di atas. Yang diterima hanya mereka yang sudah bergelar "master". Akibat kejadian ini, rombongan-rombongan berikutnya menuntut agar kalau dikirim ke Amerika harus dengan program mengambil gelar "master", yang artinya harus paling sedikit dua tahun. Demikianlah, sampai dengan tahun 1964, pengiriman staf pengajar ke Amerika selalu dengan program "ambil gelar", ada yang gelar "master" saja, ada yang terus sampai PhD.

7. Sementara itu, ada baiknya dicatat pula bahwa melalui "Dekrit 5 Juli 1959" (Manipol= Manifesto Politik). Sisitem pemerintahan Indonesia berubah, dari sistem demokrasi parlementer menjadi demokrasi terpimpin. Dalam hubungan ini, pada tahun 1960, Dekan FP, yaitu Prof Dr Ir Toyib Hadiwijaya diangkat menjadi Menteri PTIP (Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan). Posisi dekan digantikan oleh Prof Dr Ir Bachtiar Rivai.

8. Pada tahun 1963, FP dan FKH melepaskan diri dari UI, dan menjadi Institut Pertanian Bogor (IPB), setingkat dengan universitas. Guna memenuhi syarat sebagai sebuah universitas, maka FP dipecah menjadi tiga fakultas, yaitu Fakultas Pertanian, Fakultas Kehutanan, dan Fakultas Teknologi dan Mekanisasi Pertanian (Fatemeta). Sedangkan FKH juga menjadi tiga, yaitu FKH, Fakultas Peternakan, dan Fakultas Perikanan. Dikemudian hari, jumlah fakultas menjadi bertambah dan berkembang menjadi seperti adanya sekarang. Saat itu sebagai rektornya terpilih Dr Ir Bachtiar Rivai.

9. Di tahun 1964, karena sesuatu hal (yang tak perlu saya ceritakan di sini), Pak Bachtiar Rivai harus meninggalkan IPB, dan sebagai penggantinya sebagai rektor adalah Prof Dr Ir Sajogyo.

10. Sementara itu, atas dasar pengalaman tersebut di atas (lihat butir 5 dan 6 di atas), Prof Howard Beers sebagai ketua KCT mengirim memo kepada Prof Bachtiar Rivai saat masih menjabat rektor, yang isinya "agaknya mutu sarjana Indonesia itu berada di bawah mutu "master". Sementara itu, pada masa

pergantian rektor itu situasi politik sedang mulai memanas yang bernuansa anti Amerika. Entah bagaimana prosesnya, ternyata memo Prof Beers tersebut jatuh ke tangan mahasiswa, dan salinannya lalu ditempel di berbagai papan pengumuman. Prof Sajogyo yang membaca memo tersebut agaknya merasa tersinggung dan membuat pernyataan juga yang isinya kurang lebih terbalik: "kualitas master Amerika itu mutunya di bawah sarjana Indonesia".

11. Tahun 1965 terjadilah peristiwa politik yang melahirkan era orde baru. Karena sejak 1966 saya meninggalkan IPB, maka saya tidak tahu persis apa yang kemudian terjadi di IPB. Yang saya tahu sejak 1970-an muncullah gagasan bahwa agar sarjana-sarjana Indonesia yang dikirim ke Amerika itu bisa langsung ambil PhD, di IPB perlu dibangun program "magister" (yang dimaksud, setara dengan "master"). Program kuliah yang semula 5 ½ tahun untuk menjadi Ir (sarjana), dipadatkan menjadi 4 tahun. Lulusan 4 tahun itu disebut "Stratum-1" (S-1) dan lulusan "Magister" disebut "Stratum-2" (S-2), sedangkan jika lulus program *doctor* (PhD) disebut Stratum-3 (S-3).

12. Sebenarnya, dalam sistem "studi bebas" (gaya Belanda), insinyur lulusan program 5 ½ tahun itu disebut "sarjana" dan setara dengan "master" (ijazah saya sendiri, dalam transkipnya Bahasa Inggris dicantumkan penjelasan …"*equivalent master in agricultural science*".

13. Semula, <u>tujuan idealnya</u> untuk membangun program "magister" itu adalah sebagai persiapan untuk menuju program PhD. Karena itu masa 5 ½ tahun program lama itu "dipadat"kan menjadi hanya 4 tahun, sehingga dalam waktu 6 tahun (4+2), langsung bisa menuju program *doctor*. Yang dimaksud dengan "dipadat"kan adalah <u>substansi perkuliahan</u> selama 4 tahun itu sama dengan yang diberikan selama 5 ½ tahun, baik macamnya mata-kuliah, maupun isi dan bobotnya. Karena itu, lulusan S-1 juga disebut "sarjana". Inilah yang dikemudian hari menimbulkan kerancuan.

14. Sayangnya, dalam perkembangannya, atau praktiknya, hal tersebut di atas tidak terjadi, sehingga seorang pakar asing (saya lupa namanya) pernah menyatakan, "Program S-1 dan S-2 di Indonesia itu mengalami 'involusi'!". Pandangan ini seirama dan pandangan Almarhum Sutan Takdir Alisyahbana yang waktu itu sebagai Rektor Universitas Nasional (Unas), bahwa pada hakekatnya lulusan S-1 itu adalah "sarjana muda" (belum sarjana). Dan karena itu gelar "sarjana muda" yang dalam sistem lama dulu adalah lulusan C-2, ditiadakan. Pandangan Pak Sutan Takdir ini saya cek dengan Almarhum Pak Sajogyo, dan beliau membenarkannya.

15. Saya pernah menanyakan kepada beberapa pakar asing, apa bedanya "*undergraduate*" (sarjana muda atau S-1) dengan "master"? Jawabannya, seorang bergelar "master"? Jawabannya, seorang bergelar "master" itu harus sudah mampu melakukan penelitian secara "mandiri".

V. PENUTUP

Demikianlah dengan latar belakang yang panjang lebar tersebut di atas, ada beberapa butir pokok pandangan yang bisa diringkaskan sebagai berikut:

1. Beda antara sistem "studi-bebas" gaya Belanda dan sistem "studi terpimpin" warisan Amerika adalah landasan filosofinya (lepas dari masalah kepentingan politik), yaitu:
    a. Belanda: Pelajar di Sekolah Tinggi itu orang yang sudah atau akan menjadi "dewasa" (karena itu dalam Bahasa Indonesia disebut "mahasiswa", bukan sekedar "siswa"). Karena itu tujuan pendidikan tinggi adalah membentuk manusia intelektual.
    b. Amerika: Prinsip "demokrasi", yaitu setiap orang berhak memperoleh pengetahuan akademik. Jadi, "disuap" secara merata, sehingga semua mempunyai bekal yang sama. Karena "disuapi", maka ukuran kualitas mehasiswa dilihat dari nilai untuk mata kuliahnya. Sedangkan disertasi itu hanya disebut sebagai "sebagian syarat" (*partial requirement*) untuk memperoleh gelar PhD. selanjutnya terserah kepada yang bersangkutan untuk mampu mengembangkan dirinya atau tidak.

    Dengan demikian, bagi gaya Belanda, gelar akademik yang top adalah "*doctor*". Sedangkan orang Amerika, lulusan PhD itu tidak langsung bisa menduduki jabatan-jabatan tinggi. Istilahnya: "baru mulai".

2. Perlu disadari adanya perbedaan antara gelar akademik dan gelar profesi.
    a. Insinyur, dokter (tabib), advokat, semua itu gelar profesi, bukan gelar akademik.
    b. Gelar akademik itu sebenarnya hanya dua, Drs (atau "sarjana") yang artinya calon *doctor*, dan *doctor*.
    c. Gelar Profesor, sebenarnya juga merupakan gelar profesi, yaitu guru besar di perguruan tinggi, yaitu gelar jenjang kepangkatan dalam dunia perguruan tinggi. Setelah orang tidak lagi mengajar di situ, seharusnya gelar professor itu tak dipakai lagi.
    d. Gelar yang bisa disandang seumur hidup adalah "*doctor*". Setelah orang menjadi Dr, gelar-gelar lainnya sebenarnya tak perlu dicantumkan, kecuali gelar profesi sepanjang yang bersangkutan masih mengerjakan profesinya.
    e. Dalam sejarahnya, di Inggris dahulu misalnya, gelar "master" itu juga gelar profesi, yaitu sarjana yang mengajar di universitas tapi kepangkatannya belum mencapai tingkat profesor.

3. Di Indonesia saat ini, berbagai gelar bersimpang siuran. Tafsir saya, semua itu merupakan warisan naluri feodal, yaitu sikap mental "mendewakan" gelar.

Demikianlah, renungan ini saya tutup dengan sekali lagi berterus terang bahwa semuanya itu hanya didasarkan atas "kesaksian", pengalaman terbatas, ingatan, hasil diskusi dengan beberapa pakar asing, dan literatur terbatas. Tujuan menulis renungan ini sebenarnya justru untuk memancing beliau-beliau yang sebenarnya lebih mempunyai otoritas untuk masalah ini.

BACAAN

Anon. 1980. *The Encyclopedia Americana*. Edisi International. Connecticut (USA): Americana Corporation. Vol 12.

Eells, WC & Haswell, HA. 1960. *Academic Degrees: Earned and Honorary Degrees Conferred by Institutions of Higher Education in the United States*. California (USA): U.S. Department of Health, Education, and Welfare, Office of Education.

Haycraft, FW. 1948. *The Degrees and Hoods of the World's Universities & Colleges*. London (UK): Cheshunt Press.

Sasnett, Martena Tenney. 1952. *Educational Systems of the World*. California (USA): University of Southern California Press.